

## **PENTINGNYA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH**

**Oleh: Farida Hanum  
FIP Universitas Negeri Yogyakarta**

### **Abstract**

The Indonesian society is a multicultural one consisting of a variety of ethnic groups with a variety of languages and cultures of their own. It implies not only a richness and strength but also a potential for conflict. Such potential is also implied in the country's relationships with other countries; in the communication between the peoples concerned, misunderstandings may result due to differences in culture.

To understand and respond to the differences peacefully, it is important for the peoples concerned to have multicultural education, formally or informally. Such education can be integrated into some relevant lessons in class. Multicultural education should not only teach ethnical cultural symbols, such as, traditional houses, dress, dances, or songs; but also involve transformation and action.

In the implementation of such multicultural education, there must be challenges coming especially from teachers and other educators at schools who underestimate multicultural education while the educational resources involved need to be free from bias and stereotyping related to ethnical, religious, gender, social class, and urban-rural (or city-village) differences. This should similarly apply on authors, leaders of national educational institutions, and parents. In order to have superior capacity of implementing the multicultural education, it is necessary to have multicultural reading sources as well as multicultural training sessions and workshops involving teachers/lecturers and stakeholders.

**Key words:** education, multicultural, school

## **Pendahuluan**

**I**ndonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Di Indonesia terdapat sekitar 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda (Yakin, 2005: 4). Pada pertengahan 1980-an, diperkirakan sekitar 82,2% penduduk terdiri dari 14 kelompok etnik utama dengan anggota lebih dari satu juta orang. Sekitar 99,4% penduduknya merupakan penganut lima agama besar di dunia. Penganut Islam kurang lebih 86,9%, Protestan 6,5%, Katolik 3,15%, Hindu 1%, dan Budha 0,6% (Kamanto, 2004).

Lebih khusus lagi, apabila dilihat dari cara pandang, tindakan, dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya, tidak dapat dipungkiri mereka mempunyai pandangan yang beragam. Contohnya, masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, yang meliputi: pendidikan, etnis, agama, kelas sosial, dan ekonomi juga mempunyai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda terhadap berbagai macam fenomena sosial seperti demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan terhadap hal lainnya. Ada anggota masyarakat yang kurang mendukung adanya proses demokratisasi di negara ini, namun di sisi lain tidak sedikit yang menginginkan adanya demokratisasi. Ada anggota yang sangat peduli dan selalu memperjuangkan hak-hak asasi manusia, namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli dengan masalah tersebut, bahkan dengan sengaja menggilas hak-hak asasi orang lain. Ada anggota masyarakat yang merespons baik dan bahkan mendukung adanya kesetaraan gender, namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang menentangnya (Yakin, 2006).

Keragaman ini diakui atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa ke-

manusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain adalah bentuk negatif yang nyata dan sebagai bagian dari multikulturalisme ini.

Sedikitnya selama tiga dasawarsa, kebijakan yang sentralistis dan pengawalan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional, dan damai. Kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa. Hal tersebut juga menunjukkan betapa kentalnya prasangka antarkelompok dan betapa rendahnya rasa pengertian antarkelompok. Kekuasaan komunal dan negara seakan telah menjadi ciri-ciri permanen masyarakat Indonesia. Colombijn dan Lindbald (2002: 18) menyebut Indonesia sebagai “*a violent country*”. Menurut pengamatannya, orang-orang Indonesia telah mengalami tingkat kekerasan yang mengerikan baru-baru ini. Dengan mengutip banyak sumber, mereka menunjukkan banyak kasus konflik bersenjata, pemusnahan, pembunuhan, pembantaian, pemenggalan, perkosaan, intimidasi, dan perusakan properti publik dan swasta, serta fakta bahwa pada tahun 2001 terdapat 1,3 juta orang tidak tercatat (mungkin hilang) di Indonesia.

Sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak bahwa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan sebagainya, sehingga negara Indonesia dapat disebut memiliki masyarakat yang multikultural, tapi di pihak lain realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang dapat menjadi “*integrating force*” yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.

Pluralisme atau kemajemukan pasti didapati pada setiap masyarakat. Teristimewa pada saat ini, ketika teknologi transportasi dan informasi telah mencapai kemajuan sangat pesat, kemajemukan merupakan *inevitable destiny* di tingkat global maupun di tingkat negara dan komunitas. Secara teknis dan teknologis kita telah mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun spiritual kita

belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang memiliki perbedaan budaya yang antara lain mencakup perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial (Khisbiyah, 2000).

Seperti halnya bangsa Indonesia, kemajemukan suku merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering dibanggakan. Banyak orang yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah terbukti di beberapa wilayah konflik di Indonesia, seperti terjadi di Sambas (Kalimantan Barat), Poso (Sulawesi), Aceh (Sumatera), ataupun perkelahian antarkampung yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Jawa, seperti misalnya yang kerap terjadi di Kabupaten Indramayu (Jawa Barat).

Berdasarkan permasalahan seperti di atas, perlu kiranya dicari strategi khusus dalam memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan multikultural menawarkan salah satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa, seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Pendekatan melalui pendidikan multikultural yang terpenting, strategi pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan multikultural ini adalah seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural, seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.

Dengan menggunakan sekaligus mengimplementasikan strategi pendidikan yang mempunyai visi-misi yang selalu menegakkan dan

menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme diharapkan para siswa dan mahasiswa dapat menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari. Pada akhirnya, diharapkan permasalahan yang dihadapi bangsa ini lambat laun dapat diminimalkan karena generasi di masa yang akan datang adalah “generasi multikultural” yang menghargai perbedaan, selalu menegakkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.

### **Pengertian Pendidikan Multikultural**

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan jangan hanya dipandang sebagai “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestis sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya atau keturunan yang diwarisinya.

Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh, ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural seharusnya mencakup subjek-subjek, seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM: demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Tilaar, 2002).

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskrimi-

nasi dalam proses pendidikan (Ma'Hady, 2004). Sejalan dengan itu, Musa Asy'arie (2004) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menghadapi benturan konflik sosial.

Yakin (2005) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga akan melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Artinya, siswa selain diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, mereka juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme, dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah.

Pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhir dapat dicapai dengan baik. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, dan pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. Harapannya, apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta didik. Tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai

materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi mereka diharapkan juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, humanisme.

Berkaitan dengan kurikulum, dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap dan moral yang diharapkan.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang dari etnis lain. Artinya, secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok, seperti etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender, sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan.

Selain perbedaan etnis, sebenarnya perbedaan keyakinan (agama) juga cukup rawan menyimpan potensi konflik yang dapat menghancurkan kebersamaan dan persaudaraan. Di Indonesia, kasus yang demikian yang terjadi di wilayah Poso yang ternyata cukup sulit untuk diselesaikan. Tidak terhitung berapa banyak air mata, nyawa, harta, dan keutuhan keluarga yang dikorbankan dengan tujuan perjuangan yang tidak jelas. Kebencian yang mendalam antarsesama etnis yang kebetulan berbeda agama telah menghilangkan rasa kebersamaan dan solidaritas daerah.

Masing-masing kelompok agama tersebut menganggap bahwa mereka dalam posisi yang benar; kerukunan umat beragama yang dipelajari melalui *teks book* di sekolah seolah-olah tidak bermakna sama sekali. Nampaknya, konflik yang disebabkan oleh perbedaan

agama cukup sulit untuk ditangani sebab faktor primordial ideologis yang telah tertanam di jiwa seseorang sulit untuk dihilangkan. Hal tersebut terjadi karena telah mendarah daging dan menjadi bagian dari hidup dan tingkah-laku individu. Seorang individu untuk dapat memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati perbedaan agama, seyogianya sejak kecil nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui berbagai kesempatan, baik yang berupa wacana maupun tindakan-tindakan nyata. Dalam hal ini keteladanan sikap dari orang tua, guru dan orang dewasa di sekitar individu berpengaruh sangat besar.

Agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia di bumi ini. Sayangnya, dalam kehidupan yang nyata, agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia, contoh konkret di Bosnia Herzegovina, Irlandia, dan sebagainya. Di Indonesia juga terjadi serangkaian kejadian pahit, seperti di Poso, Ambon (1999-2002); Surabaya Situbondo dan Tasikmalaya (1996), dan sebagainya. Tidak saja korban jiwa yang sangat besar akan tetapi juga telah menghancurkan ratusan tempat ibadah (baik gereja maupun masjid) yang terbakar dan hancur.

Setelah adanya kenyataan pahit yang demikian, sangat perlu membangun upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi beragama melalui sekolah adalah beberapa upaya preventif yang dapat diterapkan. Berkaitan dengan hal ini, penting bagi institusi pendidikan dalam masyarakat yang multikultural untuk mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik seperti yang ada dalam nilai-nilai pendidikan multikultural.

Dalam pendidikan multikultural, seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkannya. Mereka juga harus mampu menanamkan nilai-nilai keragaman yang inklusif kepada para siswa. Pada akhirnya, dengan langkah-langkah demikian, *output* yang diharap-



kan dari sebuah proses belajar mengajar nantinya adalah para lulusan sekolah atau universitas tidak hanya pandai sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan yang lain.

Mengingat perkembangan sosial dan politik baru-baru ini, masyarakat Indonesia mulai menunjukkan kepentingan akan pendidikan multikultural. Para pakar, pendidik, birokrat dan aktivis NGO telah menunjukkan perhatian dan minat mereka dalam pendidikan multikultural, terlihat mulai banyak yang membahasnya pada seminar, *workshop*, kuliah maupun publikasi di media. Oleh sebab itu, sudah saatnya penerapan pendidikan multikultural di sekolah dilaksanakan.

Visi pendidikan di Indonesia sebaiknya diarahkan kembali sebagai agen perubahan (Semiawan, 2004). Sistem ini akan mampu mendukung dan menciptakan bersama nilai-nilai baru di masyarakat. Jika diterapkan dalam pendidikan, hal ini berarti pembentukan kemampuan bertindak lokal dengan visi global. Terutama bagi mereka yang bertanggung jawab pada penyiapan generasi mendatang. Mereka harus mampu memahami, menghadapi dan menangani masalah-masalah global, terutama masalah keberagaman yang ada di dunia.

Salah satu syarat primer dari trend ini adalah pemahaman adanya keberagaman dalam pendidikan. Setiap individu mempelajari nilai, simbol dan komponen-komponen lain dari kebudayaan atau sistem sosial suatu kebudayaan. Dalam proses otonomi daerah, pendidikan multikultural perlu digalakkan. Setiap anak adalah bagian dari kelompok tertentu, kelas sosial tertentu, suku tertentu, agama, gender ataupun kelompok sosial lainnya. Dalam upaya memahami apa yang dialami anak, penting memahami aspek-aspek subjektif dari pengalaman individunya sendiri seberapa jauh dia mengenali diri dengan kelompok di mana dia berada, bagaimana sosialisasi berjalan dan apa yang diharapkan lingkungannya.

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama; seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalitas kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan, hendaknya perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multikultural yang efektif, sehingga setiap siswa seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pengajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk ini kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Pada siswa atau mahasiswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai. Itu berarti harus ada perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai khususnya bagi civitas akademika di sekolah. Ketika siswa atau mahasiswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai suatu yang memperkaya mereka. Gibson (dalam Hernandez, 2001) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses tempat individu mengembangkan cara-cara mempersepsikan, mengevaluasi berperilaku dalam sistem kebudayaan yang berbeda dari sistem kebudayaannya sendiri.

Pandangan Gibson ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya sekedar urusan sekolah atau pendidikan multikultural dengan sekedar program sekolah formal. Pandangan ini lebih luas, pendidikan sebagai transmisi budaya, baik melalui pembelajaran formal maupun informal. Selain itu, pandangan ini tidak lagi menyamakan kelompok kebudayaan dengan suku (etnis). Artinya, tidak lagi mengkaitkan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok etnik (suku) saja, namun lebih luas dari itu sebab kelompok komunitas yang tidak terdiri dari satu etnis (suku) juga memiliki kebudayaan yang khas dari hasil interaksi sesama anggota

komunitasnya. Oleh sebab itu, siswa atau mahasiswa sangat penting memiliki kemampuan untuk dapat hidup dalam keberagaman. Selanjutnya, pendidikan yang meningkatkan kesadaran kecakapan dalam multikultur mendorong siswa atau mahasiswa untuk tidak memilahkan antarkebudayaan asli dan tidak asli. Pemilahan semacam itu terbatas dan menolak kebebasan untuk ekspresi penuh tentang keanekaragaman kebudayaan. Pendidikan sebenarnya mampu mengantarkan siswa atau mahasiswa berpandangan bahwa multikultural atau perbedaan kultural adalah hal yang biasa.

Dalam menerapkan pendidikan multikultural tampaknya lembaga-lembaga pendidikan yang ada perlu mengalami perubahan mendasar. Di samping mencerminkan keanekaragaman suku dan budaya, pendidik perlu mempunyai sikap dan harapan positif terhadap berbagai macam siswa atau mahasiswa dan mampu mengamalkan kurikulum yang terfokus pada aksi dan transformasi, yang menggunakan strategi pengayaan *constructivist, personalized, empowering* dan partisipatori, dan menyajikan materi pengajaran dengan perspektif-perspektif ras, etnik dan kultural yang bermacam-macam atas kejadian, konsep, dan isu-isu. Bennet (1999) menekankan pada "*fair minded critical thinking*" dan pendidikan multikultural agar lebih ditekankan pada sikap dan tingkah-laku dan jangan bersifat indoktrinasi. Agar bisa menguasai kualifikasi-kualifikasi multikultural, pendidik perlu dilatih dalam lembaga-lembaga yang relevan. *Stakeholder* lain seperti administrator, pengarang buku bacaan dan materi pelajaran lain juga perlu menguasai konsep dan keterampilan multikultural yang sesuai.

Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan masuk pada kurikulum formal (mengubah kurikulum yang ada). Yang paling penting dapat diimplementasikan langsung pada tindakan nyata. Senada dengan itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X (2004) juga mengungkapkan bahwa dalam pendidikan multikultural guru ataupun dosen harus memberi contoh sikap dan keteladanan seperti yang ada pada nilai-nilai multikultural. Dengan demikian, para siswa dan mahasiswa

akan mengikutinya. Selanjutnya, beliau menambahkan kalau mau menjadi guru dan dosen yang baik, harus bisa menjadi contoh yang menghargai perbedaan, bersikap toleran, cinta damai, dan saling menghargai kepada anak didiknya.

### **Perkembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia**

Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sering dilaksanakan ke arah menguatnya “sukuisme” dan “daerahisme”.

Pendidikan multikultural yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan kekuatan budaya. Yang utama, kepada anak-anak perlu diajari sikap toleransi, dan pengajaran itu harus dibuktikan dengan sikap, tindakan dan respek satu sama lain. Namun, selama ini hal itu cenderung hanya dibicarakan, tetapi kenyataannya sering berbeda.

Dalam multikulturalisme, berbagai perbedaan hendaknya dijadikan kekayaan, bukan masalah. Sikap dosen dan guru yang paling ampuh dalam mengajarkan toleransi dan saling menghargai kepada anak didik adalah melalui keteladanan dan anjuran. Pendidikan multikultural sangat penting karena kita hidup dalam negara yang multikultural, lebih dari itu kita juga menghadapi berbagai kultur dari luar akibat keterbukaan dan kerjasama antarnegara, maupun dampak dari teknologi informasi yang berkembang cepat. Oleh sebab itu, tugas menanamkan pendidikan multikultural di Indonesia lebih berat (ragam etnis, suku, agama yang cukup banyak), karena tugas tersebut memiliki misi bagaimana agar para anak didik memiliki kesadaran multikultural, yang mengandung arti memiliki kemampuan untuk bersikap toleran, menerima perbedaan dan saling menghormati meski dengan latar belakang kultur yang berbeda.

Pendidikan multikultural menurut Tilaar (2002) telah menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa ditawar di dalam membangun Indonesia baru. Dalam pandangannya, pendidikan multikultural memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praksis pelaksanaannya. Dikemukakannya lebih lanjut bahwa kita belum mempunyai pengalaman yang memadai dalam pendidikan multikultural itu, baik filsafat, sosiologi, metodologi, isi, maupun tantangan-tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak negara telah lama melaksanakan pendidikan multikultural ini. Hal ini pun dikuatkan oleh Fuad Hasan (2004) yang mengatakan bahwa pendidikan multikultural perlu cepat dilaksanakan mengingat pengalaman generasi muda saat ini berbeda dengan generasi muda masa lalu. Saat ini berbagai budaya sudah berbaur di negeri ini, dengan banyaknya budaya asing yang kian mudah diperoleh melalui beragam media, seperti televisi, internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memperpendek jarak, memudahkan adanya persentuhan budaya. Dalam globalisasi ini, pertemuan antarbudaya sudah luar biasa yang di dalamnya terjadi tarik-menarik dan saling mempengaruhi, dan ini sangat rentan untuk terjadi konflik. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk ditanamkan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Agar ke depan masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi masyarakat yang dianggap suka dengan tingkah-laku kekerasan, konflik, dan sulit menerima perbedaan.

### **Kurikulum Multikultural**

Isi kurikulum multikultural memiliki tingkatan integrasi yang harus dicermati. Paling tidak ada empat pendekatan (Hernandez dalam Semiawan, 2004), yaitu: 1) pendekatan kontribusi; 2) pendekatan tambahan; 3) pendekatan transformasi; dan 4) pendekatan aksi sosial.

Pendekatan pertama dan kedua pada umumnya struktur dan tujuan dasar tetap tidak berubah. Strukturnya sama dengan kurikulum nasional dan isi mikrokultur yang diberikan terbatas pada kejadian, peringatan, dan pahlawan. Pendekatan ini hanya berupa

tambahan yang dirancang untuk semua siswa atau mahasiswa, tetapi mereka tidak mendapat pandangan umum tentang peran dan kerangka pemikiran kelompok etnik dan mikrokultural. Umumnya hanya mengenalkan simbol-simbol etnik (seperti: baju, senjata, bentuk rumah, dan sebagainya). Isi itu ditambahkan pada kurikulum inti tanpa mengubah asumsi dasar dan strukturnya.

Pendekatan ketiga yaitu transformasi mengubah asumsi dasar dan memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk memandang konsep, isu, tema dan masalah-masalah dari perspektif mikrokultural. Keempat yaitu pendekatan transformasi dengan menambah komponen-komponen yang menghendaki siswa atau mahasiswa untuk membuat keputusan tentang permasalahan sosial tersebut dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selama ini nuansa pendidikan multikultural sudah diberikan di sekolah melalui pendekatan pertama dan kedua. Dalam beberapa materi pelajaran dulu dan sekarang telah menunjukkan kepentingan untuk keanekaragaman masyarakat. Misalnya, materi-materi berisi himbauan atas toleransi antaragama. Namun informasi tentang keanekaragaman budaya terbatas pada pengetahuan tentang nama, tempat, kejadian, seperti nama kerajaan, pahlawan yang melawan Belanda, pakaian dan tari tradisional. Ini merupakan bentuk pendidikan multikultural yang disebut oleh Derman Sparks (dalam Kamanto, 2004) sebagai "*Tourist Multiculturalism*" dan oleh Bank (2002) sebagai "*The Contribution Approach*."

Menurut penelusuran Kamanto (2004: 53), dalam kurikulum KBK tahun 2004 sudah ada mata pelajaran yang berisi pendidikan multikultural, seperti pendidikan sosiologi. Garis besar materi pelajaran sosiologi bagi siswa SMA menyebutkan bahwa fungsi pendidikan sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam realitas sosial dan budaya yang bermacam-macam atas dasar etika, nilai dan norma, serta tujuan praktisnya meliputi pengembangan keterampilan perilaku, sikap kritis, dan rasional siswa dalam menghadapi berbagai macam situasi sosial, kebudayaan, masyarakat dan masalah-masalah

sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kecakapan sosial yang diharapkan adalah “menilai keanekaragaman sosial budaya dalam kehidupan sosial”. Dalam garis besar pelajaran untuk semester pertama kelas dua SMA kata “multikultural” disebutkan secara tegas; siswa diharapkan melakukan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, menyajikan temuan-temuan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat multikultural.

Apa yang terdapat dalam kurikulum pendidikan sosiologi SMA di atas, walaupun hanya dalam bagian tertentu saja dari keseluruhan kurikulumnya, namun pendidikan multikultural yang ada telah melaksanakan pendekatan level ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan di depan; yaitu pada level pendekatan transformasi dan pendekatan aksi sosial. Seandainya pendidikan multikultural tidak masuk dalam kurikulum inti sebagai mata pelajaran tersendiri, materi-materi multikultural dapat masuk pada bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran bidang studi-bidang studi yang ada di sekolah, itu sudah sangat membantu siswa dan mahasiswa dalam mendapat dan memahami pendidikan multikultural.

### **Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Multikultural**

Tantangan utama yang dihadapi adalah bahwa proses penyebaran dan sosialisasi kebijakan pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional tersebut perlu melibatkan semua *stakeholder* yang relevan di tingkat makro dan mikro dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Karena tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kurang cukupnya pemahaman, variasi yang besar dalam interpretasi arti dan penolakan karena vested interest dari beberapa bagian *stakeholder*, lebih-lebih pada era otonomi saat ini. Selain itu seperti yang diingatkan Tibb (2002) bahwa tantangan-tantangan yang disebabkan oleh tenaga pengajar yang kurang siap dan kurang memahami multikultural menjadi kendala utama. Selain itu materi, sumber daya, perlu bebas dari bias, seperti bias kelas sosial, gender,

suku, agama, urban. Dengan demikian para pengarang sumber, materi, perlu menggunakan perspektif multikultural.

Pendidikan multikultural dapat dijalankan jika para pengajar, pimpinan, sivitas sekolah dan kampus memiliki sikap multikultural serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan dengan tepat. Hal ini juga akan menjadi tantangan, sebab sekolah-sekolah umumnya belum dapat bebas dari stereotipe dan prasangka (*prejudice*) yang bersumber dari rasa primordialisme kesukuan, keagamaan dan kelas sosial: seperti hasil temuan dari AF. Saifuddin (2004) dalam penelitiannya di 30 sekolah di 5 propinsi di Indonesia (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) pada tahun 2002 mendapatkan bahwa sebagian guru yang merupakan pendatang (migran) mengkategorikan siswa penduduk asli (pribumi) sebagai siswa terbelakang atau orang gunung/kampung. Stereotipe sering diekspresikan dalam proses belajar mengajar karena menganggap anak pendatang lebih baik dari anak pribumi (asli daerah tersebut). Kebalikan pula di pulau Jawa, guru sering menganggap anak dari daerah asal (Jawa) lebih pandai dari yang pendatang.

Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat (seperti yang disyaratkan pendidikan multikultural) di sekolah. Guru mempunyai posisi penting dalam pendidikan multikultural karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan ini. Memiliki keberagaman yang inklusif dan moderat, maksudnya guru memiliki pemahaman keberagaman yang humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif dan aktif sosial. Pemahaman ini berarti dapat menerima perbedaan, pendapat, dan pemahaman (termasuk agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan). Pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Pemahaman yang humanis adalah mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, dapat diimplementasikan dengan adanya kepedulian sosial, menghormati hak asasi orang lain, membangun



perdamaian dan kedamaian umat manusia. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.

Guru harus mampu bersikap demokratis, segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataan tidak diskriminatif (bersikap tidak adil dan menyinggung) terhadap siswa yang berbeda dengannya (mungkin agama, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya). Guru mampu memiliki kepedulian tertentu terhadap suatu kejadian (bersikap empati) walaupun itu terjadi pada orang-orang yang berbeda ras, agama, status sosial, dan sebagainya. Guru pun harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan tanpa memandang latar belakang budaya siswa. Siapapun dia, dari mana pun asalnya, diperlakukan sama sebagai siswa yang memiliki harkat martabat sebagai manusia.

Untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural, pada tahap awal sekolah atau kampus dapat memulai mengambil langkah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran multikultural dengan mengadakan berbagai aktivitas, seperti: *training* multikultural, *workshop*, seminar yang melibatkan tenaga pengajar, konselor, staf, siswa atau mahasiswa. Sekolah dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, NGO, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, MGMP. Di samping untuk pemahaman bersama tentang multikultural, juga untuk meningkatkan interaksi sosial dan memupuk kerjasama sekolah dengan para *stakeholder*, sehingga keberadaan sekolah tidak dipandang sebagai menara gading yang jauh dari realitas dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar (2002) mengungkapkan bahwa fokus pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural domain atau *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap “*indifference*” dan “*non-recognition*”

tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural berisikan tentang toleransi, empati, tema-tema perbedaan etnokultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan lain-lain.

## **Penutup**

Indonesia merupakan wilayah yang terdiri atas banyak suku dan memiliki beraneka ragam budaya, sehingga masyarakatnya merupakan masyarakat multikultural, bahkan sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kemajemukan tersebut sering menjadi kebanggaan Indonesia, banyak orang belum mengetahui dan menyadari bahwa kebanggaan itu menyimpan potensi yang berbahaya, yaitu konflik sosial, seperti yang telah terjadi di berbagai tempat di tanah air, contohnya Sambas, Poso, Aceh, Papua, atau perkelahian antarkampung yang kerap terjadi di wilayah Jawa.

Untuk dapat membangun rasa pengertian, kebersamaan dan kedamaian, perlu usaha menanamkan konsep, nilai-nilai dan keberadaan dari etnis atau golongan lain pada generasi penerus. Hal itu dapat ditempuh melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan multikultural dapat melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka sehingga sekolah tidak hanya mampu mengantarkan siswa menjadi pandai tetapi untuk dapat memiliki nilai-nilai demokrasi, humanisme dan pluralisme serta cerdas dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural diharapkan dapat melakukan transformasi pendidikan

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari praktik-praktik diskriminasi, stereotipe dalam proses pendidikan, sehingga dapat menanamkan rasa kebersamaan, keadilan dan kemanusiaan yang selanjutnya dapat tercermin dalam tindakan-tindakan orang-orang terdidik.

Dalam pelaksanaannya mungkin banyak tantangan, kendala yang utama datang dari tenaga pengajar (guru atau dosen) yang kurang memahami tentang konsep multikultural, dan sulitnya bersikap netral untuk jauh dari sikap stereotipe dan primordial. Namun sebesar dan seberat apapun tantangan tersebut, lembaga pendidikan harus memulainya sebab hal ini tidak dapat dihindari. Beberapa pakar pendidikan bahkan mengatakan sudah merupakan kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Asy'arie, Musa. 2004. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa 1-2*. [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id).
- Bank, J.A. 2002. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon.
- Bennett, C.I. 1999. *Comprehensive Multicultural Education*. Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon.
- Colombijn F. and J. T. Lindbald, 2002. "Introduction", in *Colombijn and Lindbald (eds) Roots of Violence in Indonesia*"; Contemporary Violence in Historical Perspective. Leiden: KITLV Press.
- Hamengkubuwono, Sultan X. 2004. Multikultural itu Kekuatan Budaya I\*. [www.bernas.co.id](http://www.bernas.co.id).
- Hasan, Fuad. 2003. *Pemahaman Budaya Cegah Konflik 1-3*. [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id).

- Hernandez. 2001. *Multicultural Education. A Teacher's Guide to Linking Context, Process, and Content (2<sup>nd</sup> ed)*. New York, Culombia, Ohio, USA: Merril Prentice Hall.
- Kamanto, dkk. 2004. "Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the Unfamiliar." *Antropologi Indonesia*. UI.
- Khisbiyah, Yayah. 2000. *Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme dalam Masa Depan Anak-Anak Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ma'hady, Muhaemin El. 2004. *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural* (sebuah Kajian Awal) 1-6. <http://pendidikan-network>.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2004. "Multicultural Education: Putting School First, A Lesson from Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia" dalam Kamanto, dkk. (2004) *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar*. Depok-UI: Antropologi Indonesia.
- Semiawan, Conny. 2004. The Challenge of Multicultural Education in a Pluraristic Society The Indonesian Case dalam Kamanto, dkk. (2004) *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar*. Depok: UI.
- Tibb, S. 2002. *The Importance of Teaching Multiculturalism in Elementary Class Rooms. Central Oregon Community College*. [www.cocc.edu/sdonohue/student%20writing/shanon.tibbs.htm](http://www.cocc.edu/sdonohue/student%20writing/shanon.tibbs.htm).
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Yakin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.